

Rekonsiliasi Perempuan Islam dan Komunis



Ala'i Najib

Alumni University of Leiden, The Netherlands dalam bidang Islamic Studies (2002).

Sekarang sedang menjadi visiting fellow di East West Center, University of Hawaii, Honolulu Hawaii dan bekerja untuk Lakpesdam NU Jakarta.

Rekonsiliasi Islam dan komunisme? Rekonsiliasi perempuan komunis dan perempuan Islam??? Pertanyaan pertama saja membuat saya bergidik ngeri, apalagi pertanyaan kedua! Ngeri dan ngilu karena sebagai generasi yang lahir jauh setelah peristiwa '65/'66 dan dibesarkan dengan sistem pendidikan *a la* Orde Baru dengan teks-teks sejarah yang "militan" yang sepenuhnya merujuk kepada kehendak penguasa telah membuat saya dan tidak willing untuk berfikir apa yang sebenarnya terjadi di balik

peristiwa itu, serta benar dan salah merupakan relasi kuasa, waktu itu.

Namun, era reformasi 1998-an telah membuka visi baru bangsa ini dalam segala aspek, banyak orang mulai berani menyuarakan nuraninya. Dari sinilah kemudian orang bicara rekonsiliasi. Mustahil membicarakan rekonsiliasi tanpa membicarakan Sulami dan beberapa tokoh penting Gerwani yang selain sebagai pelaku sejarah juga sempat menikmati era kebebasan.

"Saya pernah diperiksa oleh petugas dari Kodam. Dia peras saya dengan membentak-bentak, menggebrak meja, dan bertindak kasar, walau tidak sampai memukul. Padahal ia mencari pengakuan yang jelas hubungannya dengan Gerwani dan PKI.

Dia tak puas dengan jawaban saya, bahwa Gerwani berdiri sendiri, dan tidak menjadi bagian dari PKI. Saya katakan, anggota PKI yang duduk dalam DPP Gerwani adalah berbuat demikian atas keputusan perorangan. Saya sendiri bukan anggota Partai. Saya independen.

Dia tak puas dengan jawaban itu, dan tetap menuduh Gerwani sama dengan PKI. Karena jengkel, dia bilang: "Untung saya memeriksa Ibu sesudah ada penertiban hukum. Kalau kemarin-kemarin saya mendapat jawaban begini, ooo... rusak Ibu."¹

¹Kisah nyata-wanita di penjara 20 tahun karena tuduhan MAKAR dan SUBVERSI dalam "Pengakuan Saksi", Sulami, *Perempuan-Kebenaran dan Penjara* (Jakarta: Cipta Lestari, 1999), hlm. 49-50.

Penggalan kisah tersebut berasal dari seorang “terdakwa” yang sempat memberi penjelasan relasi Gerwani dan G30S/PKI saat diinterogasi dalam tahanan politik. Banyak kisah lainnya dituturkan dengan kata yang sarat makna penderitaan, genangan air mata dan ketegaran jiwanya dalam buku memoarnya yang ditulis setelah bebas bersyarat dari penjara (1984). Perempuan itu bernama Sulami, kelahiran Sragen Jawa Tengah, 15 Agustus 1926. Ia pernah bergabung dengan TNI saat Belanda melakukan Agresi Militer II (1949). Tahun 1951, ia masuk Gerwis (Gerakan Wanita Sedar) cikal bakal Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) di Surabaya. Lalu, ia terpilih menjadi wakil II sekjen DPP Gerwani (1957). Mewakili Gerwani (1958), ia mengikuti Kongres Wanita sedunia di Wina dan *Women International Democratic Federation* (Gabungan Wanita Demokratis Sedunia) di Berlin Timur. Sebelum meninggal, 9 Oktober 2002, bersama teman sejawatnya, beliau memimpin Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YP-KP).

Dalam lembar lain dari memoarnya ia mengemukakan juga;

“Memang aku pengurus pusat organisasi yang sekarang dilarang, tapi aku tak tahu dan tak ada urusan dengan penculikan jendral-jendral itu. Itu perang politik tingkat

tinggi. Orang awam takkan tahu atau mengerti”.²

Ungkapan itu merupakan renungannya sewaktu masih buron (1965-1967), beberapa menit sebelum dibawa ke markas tempat semua tahanan disiksa berat. Sesudah ditahan sembilan tahun lebih, Sulami dan beberapa teman seperjuangannya baru diajukan ke pengadilan negeri. Dua puluh tahun ia mendapat hukuman.

Hal yang menjadi keyakinan Sulami untuk menghadapi pengadilan, antara lain, karena disebutkan bahwa Gerwani tidak terlibat dalam G30S/PKI. Diketahui hal itu melalui pesan dari seorang temannya;

“Dik, datanglah ke kompleks Parlemen di Senayan, sebab kami yang anggota Parlemen mendapat rumah untuk menampung anggota yang rumahnya menjadi korban pengrusakan. Dan dalam rapat tanggal 2 Oktober 1965 DPP telah menyatakan tidak tahu-menahu dengan G 30 S. Peristiwa itu urusan intern ABRI, karena itu penyelesaiannya harus secara intern ABRI sendiri. Ini pegangan kita”.³

Kisah nyata Sulami adalah satu hal, dan hal lainnya adalah citra Gerwani yang tertanam dalam masyarakat sejak pemberitaan G 30 S, sebagai “pelacur bejat moral”.⁴ Spektrum *labeling* terhadap

²*Ibid.*, hlm. 14.

³*Ibid.*, hlm. 3-4.

⁴Menurut riset sosiologi Wierenga, seperti dikomentari Prof. W. F. Wertheim, “Kebenaran tentang Gerwani: Aspek Gender Rejim Soeharto”, *image* buruk rupa Gerwani karena pengaruh pemberitaan media *Angkatan Bersenjata* dan *Beritha Yudha*, sejak 1 Oktober - Desember 1965 atau awal tahun 1966 yang mengkampanyekan sadisme Gerwani, khususnya *Beritha Yudha Minggu*, 11 Oktober 1965. Lihat juga, Asvi Warman Adam, “Betulkah PKI Terlibat G 30 S/PKI”, *Majalah TEMPO* edisi 2-8 Oktober 2000.

Gerwani ini begitu kuat, seperti kata intelektual muda, Muhammad Qodari, "mungkin tak ada rekayasa yang lebih berhasil" untuk menanamkan kebencian masyarakat, selain pencitraan Gerwani tersebut yang benar-benar efektif memasuki dimensi moral religiositas.⁵

Sementara itu, runtuhnya rezim Soeharto juga membukakan mata dunia, dokumen CIA (*Central International Agency*), Washington tertanggal 6 Oktober 1965 (OCI No. 2330/65), misalnya membeberkan bahwa Gerwani "terlibat" dalam G30S/PKI, antara lain; Gerakan 30 September, tampaknya didukung oleh beberapa elemen ABRI yang pro-komunis dari Jawa Tengah, anggota Pemuda Rakyat, organisasi pemuda PKI yang merupakan barisan tentara khusus PKI, dan Gerwani (barisan wanita Komunis). Disebutkan juga, bahwa Suharto mengeluarkan pernyataan publik yang tidak biasanya (beberapa jam sebelum pertemuan Soekarno dengan para Jendral, 4 Oktober). Ia menyebutkan jenazah telah ditemukan di dalam sumur di lingkungan Markas Besar Angkatan Udara Halim di

Jakarta. Juga dinyatakannya, daerah dekat sumur itu telah digunakan sebagai pusat latihan para sukarelawan dari Pemuda Rakyat dan Gerwani.⁶

Berangkat dari sebagian data-data tersebut, untuk menggagas rekonsiliasi umat Islam di Indonesia dan PKI, mustahil kiranya, bila kaum perempuan⁷ yang juga menjadi korban, ditinggalkan dalam proses perwujudannya. Meski banyak dari generasi pertama mereka sudah meninggal, masih ada *ancestral* yaitu anak dan cucu mereka yang juga menjadi korban turunan dan tidak tahu menahu tentang organisasi massa wanita terbesar pada saat itu, yakni Gerwani, organisasi yang terlarang karena dituduh terlibat dengan PKI.

Menurut Yulia Suryakusuma (1987), gerakan perempuan Indonesia pasca pelarangan Gerwani mengalami kemunduran, seiring dengan depolitisasi perempuan oleh pemerintah otoriter Orde Baru. Gerakan perempuan kembali terbentuk dan memainkan peran penting di Indonesia, setidaknya, sesaat sebelum menumbangkan rezim otoriter itu jatuh pada tahun 1998.⁸

⁵Muhammad Qodari, "Memoricide Peristiwa 1965", dalam *Kolom Tempo*, 2-8 Oktober 2000.

⁶Sumber lengkapnya, lihat pada website *detik.com*, Misteri CIA di Seputar G 30 S (5); "CIA Sebut Suharto Oportunis" ditulis Rita Uli Hutapea.

⁷Kata "Perempuan" dan "Wanita", tidaklah jauh berbeda maknanya menurut pakar bahasa Indonesia. Keduanya, pernah mempunyai makna yang baik dan makna yang buruk. Dalam tulisan ini, saya akan menggunakan sesuai dengan penggunaan konteks historisnya. Seperti, kata "perempuan" akan lebih menyiratkan kekuatan dan perjuangan. Lihat, Aquarini Priyatna, "Pendekatan-Pendekatan Analitis Tekstual Feminis", dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah: 10 Tahun Program Studi Kajian Wanita* (Jakarta: PSKW PPs UI, 2000).

⁸Tita Marlita dan E. Kristi Poerwandari, "Pergerakan Perempuan Indonesia: 1928-1965", dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, *Op. Cit.* (Jakarta: PSKW PPs UI, 2000).

Gerwani telah berlalu lebih dari tiga dasawarsa, masih mungkinkah ada "titik temu" untuk pergerakan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya secara bersama dengan (atau tanpa) diembel-embeli "komunis"? Dalam pertanyaan lain, apakah efektif menggagas rekonsiliasi perempuan Komunis dan Islam dewasa ini? Sementara banyak isu sekarang ini dilakukan perempuan secara kolektif oleh aktifis perempuan Indonesia dengan tanpa melihat latar belakang aliran, agama, atau lainnya. Misalnya, gabungan aktifis perempuan atas nama "Suara Nurani untuk Perempuan"⁹ saat peristiwa "Poligami Award" 2003, RUU Anti-KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), lalu pemenuhan kuota 30 %

untuk perempuan di parlemen dalam Pemilu 2004, *trafficking* (perdagangan) anak dan perempuan dan lain-lain.

Adalah Saskia E. Wieringa (1999), ilmuwan Belanda dan *lecturer* di *Instituut of Social Studies* Den Haag¹⁰ yang mengungkap banyak tentang tragedi ini, terutama sisi gelap Gerwani dan relasi sosial dengan organisasi-organisasi perempuan termasuk Islam, dan bagaimana Gerwani dicap sebagai sebuah organisasi perempuan rendah moral karena (dituduh) terlibat dalam kudeta militer, oleh PKI dianggap sebagai organisasi "paling feministik". Pada masa itu, Gerwani sudah menyatakan perang terhadap kolonialisme, feodalisme, imperialisme, dan kapitalisme.

⁹Kelompok ini terdiri atas; Biro Perempuan dan Anak, Biro Wanita PGI, Elsam, Fahmina, Fatayat NU, Gema Perempuan, Infid, JMP Nasional, Rahima, Kalyanamitra, Kapal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan, Komseni, Kontras, Kowani, LBH Apik, LBH Jakarta, LKBHiuWK, LPBH FAS, Mitra Perempuan, PPSW, Puan Amal Hayati, Sikap, Solidaritas Perempuan, Suara Ibu Peduli, Yappika, YKAI, KOHATI PB HMI, Kelompok Perempuan Seroja, Institut Perempuan Bandung, dan para individu yang ikut menolak. Jakarta, 24 Juli 2003 di Hotel Ibis.

¹⁰Di Belanda, banyak orang Indonesia alumni beberapa universitas terkemuka di Eropa Timur yang sangat potensial, mereka inilah para penerima beasiswa di era Soekarno. Sayangnya, pemerintahan Soeharto telah "mematikan" mereka sebagai WNI, sehingga mereka harus mengurus visa untuk menjenguk keluarganya di Indonesia. Mereka bukan saja punya organisasi yang terus memantau dan beraliansi dengan mahasiswa-mahasiswa Indonesia, tapi juga bergaul akrab dengan masyarakat Muslim Indonesia di mesjid Den Haag, atau ikut PPME (Perhimpunan Pemuda dan Mahasiswa Eropa) di cabang manapun, di antara mereka ada juga perempuannya. Saya kenal beberapa dari mereka, misalnya Pak Mintardjo, Pak Kusnan, Pak Imam Hardjo Soebroto seorang doktor ekonomi alumni universitas Moskow yang lulus dengan predikat *cumlaude* dan berasal dari Pati (kebetulan tetangga mbah saya) dan kami kenal sebagai keluarga santri. Ada juga Dr. Bambang (GMNI) yang bekerja di perpustakaan Universitas Leiden, juga beberapa perempuan. Ketika masa Presiden Gus Dur, beliau sempat mendelegasikan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menkumdam dan sempat memberi angin segar kepada mereka. Namun, semuanya sekarang tinggal kenangan, meski yang menjadi presiden adalah anak kandung Soekarno. Penelitian Wieringa nampaknya lebih merujuk kepada korban di Indonesia. Saya pernah mengikuti kuliah Wieringa tepat pada 30 September 2000, dan mendengar bagaimana kesulitannya mencari data-data itu pada masa Soeharto.

Ada tiga buku, sedikitnya, yang menjadi inspirasi utama untuk membahas rekonsiliasi perempuan “komunis” dan Islam. *Pertama*, buku “kesaksian” perempuan yang pernah dipenjarakan sebagai akibat langsung dari tragedi G 30 S/PKI dengan judul *Perempuan-Kebenaran dan Penjara* yang ditulis oleh Sulami (1999). *Kedua*, disertasi Saskia Eleonora Wieringa pada *Institute of Social Studies* Den Haag, yang dapat menjadi “fakta sejarah” (baru) Gerwani pada khususnya, yakni kajian yang tidak seperti cerita selama Orde Soeharto. Buku ini berjudul *The Politization of Gender Relations in Indonesia Women's Movement and Gerwani Until the New Order State* (edisi Indonesia, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* yang diterbitkan tahun 1999). *Ketiga*, buku yang mengisahkan “penderitaan rakyat” akibat ketetapan No. XXV/MPRS/1966, dari seorang perempuan keluarga ningrat Jawa yang hidupnya terlunta-lunta, tapi sekarang menjadi dokter dan aktifis partai nasionalis, Ribka Tjiptaning Proletariyati, dengan judul yang sempat “menghebohkan”, *Aku Bangga Jadi Anak PKI* (2002).

Gerakan Wanita Indonesia: Sekilas Progresifitas Perempuan dan Stigmatisasi

Menghilangkan memori kolektif akan stigma terhadap Gerwani bukanlah

sesuatu yang mudah. Dalam konteks Gerwani —yang telah disebut secara “serampangan” oleh Soeharto sebagai organisasi komunis— perlu ada penjelasan dengan “sebenarnya”. Fakta-fakta yang diungkap Wieringa yang berkali-kali datang ke Indonesia pada masa Soeharto, barangkali cukup membantu untuk hal ini.

Benarkah Gerwani secara genealogi punya akar komunis? ini penting untuk ditelusuri, sebab kalau tidak, kita akan keliru (lagi) membuat terminologi dengan mencapnya sebagai gerakan komunis.

Gerwani, secara historis-ideologis, berasal dari Gerwis (Gerakan Wanita Sedar/Sadar) yang dideklarasikan pada 4 Juni 1950 di Semarang. Didirikan oleh enam organisasi; Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, Persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan.¹¹

Tokoh-tokoh yang membidaninya, adalah mereka yang sejak perjuangan kemerdekaan sudah menjadi aktifis, jika tidak disebut feminis, seperti S.K. Trimurti, Salawati Daud, Ny. Dharmo Susanto atau Umi Sarjono¹². Disebut dengan nama Gerwani, tepatnya pada tahun 1954 setelah kongres kedua Gerwis.

¹¹Saskia Eleonora Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 283.

¹²SK Trimurti atau Surastris adalah Menteri Perburuahan RI pertama, pernah menjadi anggota Partindo dan Aktifis di Wanita Partindo, dan sempat jadi salah seorang pimpinan Gerindo. Salawati sebagai Walikota Makasar yang berhadapan dengan Kapten Westerling. Ny. Dharmo Susanto sudah aktif di Isteri Sedar

Dalam tubuh Gerwani memang ada dua sayap sejak kelahirannya dan sebelum benar-benar menjadi sayap perempuan PKI pada tahun 1965, yakni kelompok feminis dan komunis. Ketika dipimpin oleh sayap komunis, sebagian sayap feminis mengundurkan diri. Salah satunya adalah S.K. Trimurti. "Tidak bisa mengayuh dua perahu", ungkap Trimurti pada tahun 1957, dan ia pun keluar dari keanggotaan pada tahun 1965.¹³

Dengan demikian, anggapan yang hingga saat ini ada bahwa Gerwani hanya kelompok komunis saja, tentu tidaklah tepat. Hal ini seperti disebut dalam literatur sekitar perjuangan "wanita Indonesia". Tak akan ditemui, misalnya kegiatan bersama Gerwani dengan KWI/Kowani (Kongres Wanita Indonesia), atau dengan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) atau GOW (Gabungan Organisasi Wanita) dalam mengusung masalah-masalah yang bersentuhan dengan hak-hak perempuan, contohnya

UU Perkawinan, Buruh, demonstrasi Upah yang rendah, aksi bersama menolak Presiden kawin dengan Suhartini, dan seterusnya.¹⁴

Ketua Gerwis pertama, Ibu Tris Metty dari Ketua Rupindo (Rukun Putri Indonesia) yang berpolitik mandiri dan anggota Lasjkar Wanita Jawa Tengah. Tidak lama menjabat, pada konferensi di Jogjakarta untuk persiapan Kongres I Gerwis, diganti oleh Trimurti.¹⁵ Para pendiri Gerwis juga mempunyai hasrat yang sungguh-sungguh demi mengakhiri berbagai praktik feodalisme.

Dalam Anggaran Dasarnya, Gerwis merupakan organisasi non-politik dan tidak mempunyai kaitan dengan parpol manapun. Namun begitu, harus diakui, pengaruh PKI cukup tertanam. Orang seperti Suharti dan Mudigdo, dan beberapa anggotanya mempunyai ikatan erat dengan PKI.¹⁶ Pada Kongres I, Suharti sebagai calon dari PKI menduduki jabatan ketua. Umi Sarjono yang menjadi urutan

sebelum pendudukan Jepang, salah seorang pendiri Perwari Klaten, menjadi anggota MPRS dan perempuan pertama yang mengetuai dewan daerah (DPRD-DIY). Umi Sarjono, pada tahun 1948 mendirikan organisasi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwindo).

¹³Wierenga, *op. cit.*, hlm. 341.

¹⁴Sebut saja umpamanya, dalam karya Nani Soewondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), edisi revisi. Atau Hidayat Mukmin, *Beberapa Aspek Perjuangan Wanita di Indonesia: Suatu Pendekatan Deskriptif Komparatif* (Bandung: Binacipta, 1984). Termasuk pula, buku *50 Tahun Muslimat NU: Berkhidmat untuk Agama & Bangsa*, (Jakarta: Muslimat NU, 1996), tidak mengungkap sisi positifnya Gerwis/Gerwani. Namun literatur pasca rezim Orde Baru, sudah mulai berani menjelaskan, seperti terbitan PSW UI (2000) dan Kalyanamitra (1999).

¹⁵Hasil penelitian Wierenga menyebutkan, ibu Tetty diabaikan dalam sejarah Gerwani. Ia sangat berterus terang tentang lesbiannya, bahkan sebab digantinya juga karena alasan ini. Ia gigih pula sebagai seorang feminis yang tidak menyetujui organisasi massa. Lihat, Wierenga, *op. cit.*, hlm. 285.

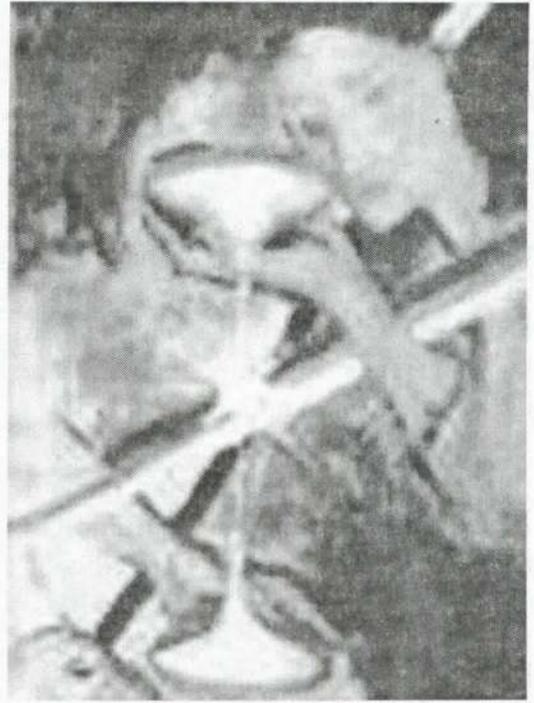
¹⁶Faktanya, pimpinan organisasi ini banyak dari wanita revolusioner yang pernah berjuang melawan penjajah Belanda, melawan pendudukan tentara Jepang, dan beradu nyawa untuk perjuangan kemerdekaan Nasional. Memang kebanyakan mereka adalah anggota PKI. Sulami, *Op. Cit.*, hlm. vii.

pertama dalam pemilihan undur diri, sedang Trimurti di urutan kedua tidak diestui PKI, akhirnya Suharti yang urutan ketiga menjadi ketua, lalu Trimurti dan Umi Sarjono masing-masing menjadi wakil ketua.

Antara kongres I (1951) dan kongres II (1954), Gerwis giat dalam tiga front; yaitu politik, feminisme dan menyokong perjuangan umum. Politik Gerwis, sejak awal, aktif menempuh politik anti-imperialisme. Katanya, pemerintah yang dinahkodai PNI, Masyumi, dan PSI, telah membiarkan kembalinya para pemilik perkebunan asing, sehingga mereka menjadi terlalu bersikap lunak terhadap modal asing dan imperialisme. Bahkan, kaum perempuan sebagai ibu rumah tangga terkena dampaknya dan menjadi sangat menderita karenanya.

Selain itu, Gerwis juga menentang PP 19 dan mendukung tuntutan *reform* perkawinan yang diajukan Kongres II KWI tahun 1952. Keterlibatan Gerwis terhadap hak-hak perempuan lain, tercermin dalam pembahasannya di konferensi kerja di Semarang 1952, mengenai perdamaian, hak-hak anak dan perempuan, serta buruh tani. Bahkan, tentang anak-anak, Gerwani juga mengambil sebagai tanggung jawabnya untuk mendirikan tempat penitipan anak, dan pendidikan anak untuk menjaga dari pengaruh-pengaruh buruk.

Kongres II memutuskan, bahwa hak-hak perempuan, anak-anak tidak terpisah-



kan dari kemerdekaan dan perdamaian. Peranan khusus perempuan sebagai pendidik anak juga diserukan dalam hubungan dengan kampanye Gerwani melawan pengaruh kejahatan moral dari berbagai film AS. Pada 1960 Gerwani merumuskan panca cinta untuk pendidikan anak, yaitu: cinta bangsa, orang tua dan manusia umumnya, kebenaran dan keadilan, persahabatan dan perdamaian, dan alam sekitar.¹⁷

Terhadap anggapan bahwa Gerwani telah melampaui sifat-sifat keperempuannya, dapat dilihat dari keinginan Gerwani setelah mengadakan kunjungan di berbagai negara yang menjadi "kiblat" gerakan-

¹⁷Wierenga, hlm. 411-413.

nya, jika bukan untuk perbandingannya;

Pada September 1954 "Ruang Wanita" HR memuat beberapa karangan tentang kaum perempuan di Uni Soviet, yang orang-orangnya "sopan santun dan berbahagia". Di sana banyak penitipan anak, pembagian kerja menurut seks sudah dihapus. Pelacuran tak ada lagi, dan kaum perempuan benar-benar menikmati persamaan hak, dan hukum perkawinan didasarkan atas monogami.

Pada 1956 HR memuji Tiongkok yang melarang pelacuran dan menghilangkan keraguan kaum perempuan, bahwa walau kaum pekerja Soviet disiplin, "namun kaum perempuan di sana tidak terlalu feminim". Ini barangkali jawaban bahwa Gerwani kehilangan sifat-sifat keperempuanan mereka.¹⁸

Sejak 1959, angan-angan Gerwani mulai bergeser ke Timur. Komune rakyat Tiongkok dilukiskannya sebagai telah membebaskan kaum perempuan dari 1001 beban kehidupan, sementara kesehatan anak-anak pun meningkat. Bisa dilihat dari gambaran komune Tiongkok yang dapat menyediakan hal-hal berikut:

"kantin-kantin [untuk] memperingan benar-benar beban kaum wanita, yang sekarang dapat bekerja di ladang-ladang karena... mereka telah dibebaskan dari beban tua "yang berabad-abad",... tiga kali makan satu hari,... orang-orang jompo [dirawat dengan baik]... sedangkan kaum wanita menerima upah sama seperti kaum

laki-laki... Sehingga... kesamaan hak antara wanita dan laki-laki sudah terwujud".¹⁹

Saya pikir, di manapun ruang itu kita tempati, apakah negara komunis atau Islamis yang kita kunjungi, pasti akan menimbulkan respons dan membawa pengaruh sendiri. Bukankah juga kiblat negara kita pada masa itu adalah ke Timur? Karenanya, 'menyeret-nyeret' Gerwani dengan PKI —mungkin ini akan terjadi di masa depan, kalau rezim berganti dan berbalik kiblat— apakah mereka juga akan 'menyeret-nyeret' gerakan perempuan sekarang dengan kapitalisme karena kuatnya hubungan kita dengan mereka saat ini! Ini hanya metafora saya dan bukan pembelaan terhadap Gerwani.

Sekalipun demikian, keharaman Gerwani hingga kini masih menjadi stigma dan *mindset* setiap generasi Orde Baru. Beda sekali citranya dengan pelajaran Muslimat yang mempunyai hubungan dengan Masyumi atau PSI sejak tahun 1960 atau Muslimatnya Masyumi serta wanita muslimah lainnya, seperti yang tergabung dalam PSI, DI/TII, PRRI/PERMESTA, dan seterusnya. Tak pernah terdengar ceritanya, ibarat debu ditelan angin musim kemarau. Bahkan, mereka dapat membuat organisasi baru juga tak dipersoalkan.

Gambaran itu semakin mendarah

¹⁸*Ibid.*, hlm. 376.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 377.

daging karena kampanye secara sengaja dan *continue* ditebarkan pemerintahan Orde Baru, baik melalui Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) dengan buku-buku pelajaran di sekolah²⁰, utamanya saat penataran P4 atau pemutaran film "Pengkhianatan G30S/PKI" setiap tahun malam tanggal 30 September, sebelum kejatuhan rezim Soeharto pada Mei tahun 1998.

Dan kita semua tahu, dalam film dokumenter versi Orde Baru, ada satu contoh bagaimana simbol perempuan yang disebut Gerwani itu sangatlah sarkatis, berdarah dingin dan nista tiada taranya. Mereka dicitrakan dengan nyanyian "genjer-genjer", minuman keras, sambil membawa silet, pisau, wajah sangar, dengan pakaian *a la* perempuan nakal. Lalu, digambarkan dengan jelas, satu persatu perempuan Gerwani menyayat wajah, tangan, atau tubuh para Jendral TNI AD yang tertangkap di Lubang Buaya, sebelum akhirnya dibuang ke dalam sumur.²¹

Menurut analisis Rinto pada tiga buku, *Kudeta 1 Oktober 1965 Sebuah Analisa Awal*, dari terjemahan *Preliminary Analysis Of The Oktober 1, 1965, Coup In*

Indonesia, Benedict Anderson dan Ruth T. McVey, (LKPSM – Syarikat 2001); *Kaum Merah Menjarah*, karya Aminuddin Kasdi (Jendela 2001) dan; *Palu Arit di Ladang Tebu*, oleh Hermawan Sulisty (Gramedia 2000), juga menampilkan referensi lain seputar kondisi tubuh para jendral yang merujuk pada pidato Presiden Soekarno pada tanggal 12 dan 22 Desember. Dikatakan Rinto, dalam laporan tim dokter yang memeriksa kondisi mayat tidak ditemukan tanda-tanda pencungkilan mata dan pemotongan alat kelamin seperti yang disebutkan dalam berita Angkatan Darat.

Lalu, pada tahun 1987, Anderson pernah menulis sebuah artikel dalam *Indonesia* No. 43 dengan judul "*How Did Generals Die?*" Ia juga menampilkan fakta-fakta baru seputar kondisi jenazah para jendral yang dibunuh di Lubang Buaya, dengan referensi hasil otopsi tim dokter yang memeriksa mayat para jendral. Dalam otopsi tersebut disebutkan bahwa alat kelamin para jendral utuh dan tidak ada luka-luka bekas sayatan benda tajam. Walaupun ada luka, hanya luka tembak atau luka akibat benturan dengan dinding sumur. Jadi jelas bahwa tidak ada sayatan

²⁰Yang disampaikan adalah sejarah PKI versi Orde Baru (berasal dari berita koran *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*). Sebut saja misalnya, pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pancasila), PSPB (Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa), Kewiraan, atau Pendidikan Kewarganegaraan saat ini.

²¹Dalam koran *Angkatan Bersenjata*, 11 Oktober 1965, diungkapkan orang-orang Gerwani: "bermain-main kemaluan para jenderal, sambil memperlihatkan kemaluan mereka sendiri... [dan] bahkan, menurut sumber yang dapat dipercaya, orang-orang Gerwani menari-nari telanjang di depan korban-korban mereka, tingkah laku mereka mengingatkan kita pada upacara kanibalisme yang dilakukan suku-suku primitif berabad-abad yang lalu. Marilah kita serahkan pada kaum wanita untuk mengadili moral kewanitaan orang-orang Gerwani, yang bermoral bejat lebih buruk dari binatang".

Diberitakan ulang *Duta Masyarakat* tanggal 12 Oktober 1965. Lihat, Wierenga, *op. cit.*, hlm. 517-518.

pada wajah para jendral, apalagi pemotongan alat kelamin.²²

Relasi PKI dan Gerwani Tahun 1965: Bencana atau Berkah?

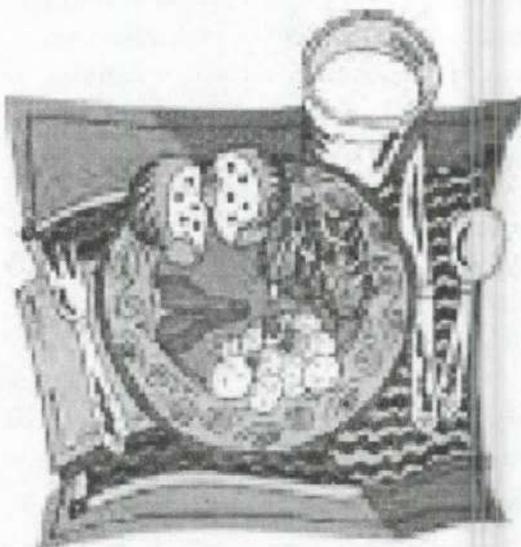
Seperti dikemukakan sebelum ini, meskipun Gerwani tidak pernah mengidentifikasi diri dengan PKI sepenuhnya, kelahiran Gerwani sejak awal tetap diharapkan menjadi sayap PKI. Apalagi, setelah pimpinan PKI dipegang oleh DN. Aidit (Januari 1951).²³ Dan, sampai saatnya yang terakhir, Gerwani mempunyai anggota baik yang komunis maupun non-komunis. Ini berbeda dengan Pemuda Rakyat yang dalam Anggaran Dasarnya menyatakan sebagai “pembantu setia” PKI.²⁴

PKI sendiri, sesudah tahun 1957, mempunyai organisasi perempuan yang disebut dengan Wanita Komunis (Wankom) dan secara resmi dibentuk pada tahun 1963 menjadi Departemen Wanita Komunis (Depwankom) dengan Suharti sebagai ketuanya.

Pimpinan PKI sendiri bicara secara terbuka tentang perempuan kali pertama pada 8 Maret 1953. Beberapa pokok pikirannya; 1) jika kaum perempuan di negeri-negeri sosialis sudah mencapai hak-hak sama sepenuhnya, maka di dalam

masyarakat kapitalis kaum perempuan masih ditindas, 2) nasib perempuan lebih muram lagi di negeri-negeri yang masih hidup dengan sisa-sisa feodalisme, seperti halnya Indonesia, dan 3) seperti “kam-pium perdamaian” Stalin mengatakan, tidak ada gerakan yang besar sekalipun akan berhasil mengakhiri penindasan, tanpa partisipasinya kaum perempuan.²⁵

Tak dapat dipungkiri, hal demikian itu juga yang menjadi perjuangan Gerwani dan mungkin juga organisasi lain yang memperjuangkan perempuan. Kesimpulan laporan Kongres 1954 lebih menegaskan lagi bahwa, Gerwani adalah



²²Rinto Trihasworo, “Sumber Sejarah Yang Timpang”, *Media Kebudayaan Rakyat*, <http://mkb.kerjabudaya.org> (2003, Media Kerjabudya Online).

²³Pada Kongres III, 1957, DN Aidit Ketua CC PKI dalam telegram ucapan selamatnya menyatakan harapan agar “kaum wanita Indonesia tidak akan ketinggalan dalam menggulung sejumlah kegiatan subversif yang sekarang merupakan tugas terpenting bagi rakyat Indonesia”.

²⁴Wierenga, *op. cit.*, hlm. 332.

organisasi untuk pendidikan dan perjuangan, yang tidak menjadi bagian dari partai politik apapun, dan keanggotaan Gerwani terbuka untuk semua perempuan Indonesia. Adapun resolusi terpenting dari kongres II ini adalah tuntutan akan undang-undang perkawinan yang demokratis. Pada Kongres itu, Umi Sarjono terpilih sebagai ketua. Dengan begitu, sayap feminis dapat menahan laju sayap komunis dalam tubuh Gerwani. Saat itu, perkembangan kader organisasi luar biasa pesatnya, dari 400.000 yang tercatat pada 1955, menjadi 663.740 ketika Kongres III tahun 1957 berlangsung.

Keberhasilan tersebut menimbulkan ketidaksukaan organisasi lain, terutama ketika pendirian Gerwani tentang perkawinan sebagai masalah individual, "Gerwani menyesali usaha berbagai pihak yang mendorong ibu Fatmawati, isteri pertama Sukarno cerai", kata Umi Sarjono. Di sini Gerwani sudah mulai mengedepankan kepentingan politik, yakni "membela" Presiden Soekarno. Bila demikian, tidak sesuai lagi dengan garis perjuangan Gerwani untuk UU perkawinan yang demokratis, kata Wierenga. Pada Maret 1957, Gerwani juga menyokong secara besar-besaran konsepsi Demokrasi Terpimpinnya Soekarno.

Kejengkelan lain, seperti diungkap organisasi perempuan lainnya, tercermin dalam laporan Kowani 1978:

PKI dan ormas-ormasnya dapat melaksanakan dengan leluasa politik intimidasi dan teror mereka terhadap partai-partai dan orang-orang tertentu, yang mereka pandang sebagai musuh-musuh Nasakom, dengan menuduh mereka sebagai Kontra-revolusioner/Anti-Bung Karno/agen-agen Neokolonialis... Suasana tegang ini juga mulai mempengaruhi gerakan wanita, oleh karena Gerwani berhasil menduduki kursi kepemimpinan KWI dalam tahun 1957. Pengaruh Gerwani bertambah besar ketika susunan pengurus KWI pada Kongres ke-20 tahun 1961 di Jakarta mengalami perubahan... Intimidasi dan tekanan mulai dilakukan atas tokoh-tokoh organisasi wanita, khususnya yang anti-Komunis. Antara tahun 1961 sampai 1965 gerakan wanita disisihkan untuk menjadi "alat revolusi".²⁶

Sejak tahun 1960-an, Gerwani semakin terpengaruh oleh PKI, baik secara ideologis maupun kepemimpinannya. Ideologi resmi Gerwani, antara tahun 1962 sampai 1 Oktober 1965 adalah:

"perjuangan demi hak-hak perempuan tidak dapat dipisahkan dari perjuangan demi masyarakat sosialis, atau perjuangan melawan imperialisme, maka dari itu Gerwani harus ambil bagian dalam perjuangan untuk *land reform* dan konfrontasi dengan Malaysia".²⁷

Pada Januari 1965, Sidang Pleno memutuskan Gerwani terpaksa menggantungkan pada PKI. Para anggota Gerwani menyokong PKI karena mereka merasa

²⁵*Ibid.*, hlm. 350.

²⁶*Ibid.*, hlm. 336.

program PKI menjamin emansipasi dan hak sama untuk perempuan, seperti dipaparkan sebelum ini.

Lantas, pada bulan September 1965, seperti diakui Sulami sebagai wakil sekretaris jenderal II, Dewan Pimpinan Pusat Gerwani masih sempat melakukan sidang-sidang untuk persiapan Kongres ke-4, 22 Desember 1965 di Jakarta. DPP sama sekali tak pernah membicarakan akan terjadinya G30S. Jadi, tidak ada surat instruksi apapun ke daerah, dan tidak ada latihan mengikuti Sukarelawan Wanita, dan seterusnya. Semua kegiatan waktu itu hanya tertuju pada Kongres.²⁸ Namun demikian, sejarah Indonesia menentukan lain berkaitan dengan PKI dan Gerwani, terutama sejak peristiwa Gestok (Gerakan Satu Oktober), istilahnya Presiden Sukarno.

Dalam situasi pasca Gestok ini, hampir semua kekayaan yang dimiliki Gerwani telah habis ludes semuanya. Sekelompok masyarakat yang "disponsori" Angkatan Darat (RPKAD) dapat dengan mudah melakukan penjarahan. Bahkan lembaga pendidikan TK "Melati" juga tak luput dari realitas demikian.

Dalam kondisi seperti itu, Ny. Solichah Wahid Hasyim selaku pimpinan Muslimat mengambil sikap yang tegas. Rumahnya, Jl. Taman Amir Hamzah Jakarta Pusat, dibuka lebar-lebar sebagai

markas untuk pertemuan para tokoh NU dan tokoh nasionalis lain. Ketika beberapa tokoh NU sedikit ragu-ragu untuk menentukan sikap keras menghadapi itu Ny. Wahid Hasyim tampil mendesakkan tekadnya: Bubarkan PKI. Benar, atas desakan beliaulah kemudian dicatat dalam sejarah, bahwa NU termasuk ormas yang paling awal mengibarkan tuntutan agar PKI dibubarkan.²⁹ PP Muslimat juga membuat pernyataan agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membubarkan TK Melati, sebuah TK yang dikelola Gerwani, dan mengambilalih TK tersebut pada tanggal 19 Oktober 1965.³⁰

Perburuan, penjarahan, atau pemilikan harta dari para anggota (yang diduga) PKI, simpatisan dan keturunannya telah dimulai sejak saat itu dan semakin mendapatkan legitimasi lagi, karena negara melalui TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 mengeluarkan keputusan untuk melakukan hal itu. Dalam konteks ini, maka rekonsiliasi sangat penting. Sebab, bukan sekadar antar-individu atau masyarakat lagi, tapi negara dengan jelas telah terlibat di dalam "tragedi berdarah" ini. Cerita ibu Sulami (alm.) dan RibkaTjiptaningrum melalui bukunya dapat membantu merajut dan merunut kejadian, penindasan, dan ketidakmanusiawian negara atau pemerintah.

²⁷Ibid., hlm. 329.

²⁸Sulami, *op. cit.*, hlm. 2

²⁹Asmah., *op. cit.*, hlm. 77 atau 103 dan 127.

³⁰Asmah., *op. cit.*, hlm. 77-78 atau 103.

Ikhtiar Perempuan Islam dan "Komunis": Rekonsiliasi Sesama Anak Manusia

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam surga dan (taman-taman), (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir). (Dikatakan kepada mereka): "Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan Kami melenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Mereka tidak akan merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan dari surga". (QS. al-Hijr [15]: 45-48).

Bumi penuh dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan ketidakadilan (al-hadits).

Menurut Mahmud Muhammad Thaha, bagian bumi adalah komunisme yang akan diwujudkan oleh Islam dengan datangnya umat muslim. Yang dimaksud komunisme di sini adalah seluruh hasil bumi dinikmati secara merata di kalangan masyarakat. Lebih lanjut dikatakannya, demokrasi adalah saudara kandung sosialisme. Sosialisme sendiri lebih membutuhkan kesadaran kolektif daripada yang dibutuhkan demokrasi.³¹

Pemahaman Thaha, memang menarik dalam konteks wacana komunis di In-

donesia karena selama ini telah terdhalimi. Sementara kita juga bisa merujuk kitab *al-Mustasyfâ* karya al-Ghazali yang menyebutkan bahwa kemashlahatan itu mewujudkan tujuan agama, di antaranya adalah menjaga dan melindungi lima hal; *al-dîn* (agama/keyakinan), *al-nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-nasl* (keturunan), dan *al-mâl* (harta benda).³²

Dengan menyadari beberapa konsep tersebut, apa yang mesti ditunggu untuk melakukan rekonsiliasi antara Islam dan Komunis, khususnya bagi kalangan perempuan! Kiranya, benar apa yang dikatakan Asvi Warman Adam, sejarawan LIPI bahwa:

"Saya tidak membantah perihal tindakan brutal oleh PKI dan ormasnya sebelum tahun 1965. Aksi sepihak yang dilancarkan oleh orang-orang Komunis dalam mengampanyekan ketentuan *land reform* telah menimbulkan konflik sosial, terutama di pedesaan. Di bidang seni dan budaya terjadi pengekangan kebebasan bagi kelompok yang tidak mendukung Manipol, seperti yang dialami Taufiq Ismail dkk. Aktivis organisasi Islam PII dipermalukan (seperti dalam insiden Kanigoro), HMI dituntut agar dibubarkan.

Namun, semua tindakan yang kasar itu telah dibalas dengan pembantaian terhadap paling sedikit 0,5 juta orang yang dicurigai sebagai penganut paham komunis

³¹Mamud Muhammad Thaha, *ar-Risâlah ats-Tsâniyah min al-Islâm*, edisi Indonesia *Arus Balik Syari'ah*, penterj. Khoirun Nahdliyyin (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 194-195.

³²Abu Hamid ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfâ min 'ilm al-Ushûl* (Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabiy, [tt]) juz I, hlm. 286.

di Indonesia. Rasanya, pembalasan itu sudah jauh dari setimpal. Seyogianya rekonsiliasi antara umat Islam dan orang-orang kiri dilakukan 1966.”³³

Kini, kejadian itu sudah lewat, hampir 37 tahun lamanya. Rezim *toh* telah silih berganti, dan sekarang presidennya, ibu Megawati. Ia juga orang yang pernah juga menderita, haruskah menunggu bukti-bukti lain, atau pengakuan dan saksi-saksi agar dapat membuat buku lagi, seperti Sulami (alm.) dan Ribka Tjiptaning Proletariyati³⁴ akibat kebijakan negara yang otoriter?

Sementara itu, dalam hubungan antara Gerwani dan gerakan perempuan Islam —jauh sebelum terjadinya G30S/PKI— terdapat dua tokoh perempuan yang berusaha keras menjembatani kesenjangan tersebut. *Pertama*, Ny. Aruji Kartawinata³⁵ dari PSII (Partai Serikat Is-

lam Indonesia). *Kedua*, Ny. Aminah Hidayat, yang pernah menjadi anggota Gerwani. Hanya PSII sajalah, satu-satunya organisasi Islam yang kaum perempuan anggotanya kadang-kadang ikut bersama-sama dalam aksi-aksi dan demonstrasi-demonstrasi yang dilancarkan Gerwani atau SOBSI bagian perempuan.

Ny. Aruji pernah menguraikan hubungan Islam dan perempuan, merinci kesesuaian-kesesuaian antara Islam dengan “ilmu pengetahuan sekuler”. Islam menekankan hubungan saling cinta antara suami isteri, Islam tidak menghalangi kaum perempuan aktif secara ekonomis, dan ditegaskannya juga tentang perlawanan Islam terhadap perjudian dan riba.

Ny. Aminah berasal dari Minangkabau dan pernah belajar di sekolah perempuan Islam di Padang Panjang. Ia

³³Asvi, *op. cit.*, *Tempo* 2-8 Oktober 2000.

³⁴Demi keamanan pada saat keluarganya mengungsi, nama belakang “Proletariyati” tidak ia pakai. Begitupun dengan asal kelahirannya, aslinya lahir di Manahan, Solo, 1 Juni 1958 diubah lahir di Yogyakarta, 1 Juli 1959. Ayahnya keturunan Kasunanan Solo (Pakubuwono), seorang aktifis PKI bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro, dan ibunya bernama Bandoro Raden Ayu Latri Suyati. Selama ayahnya yang konglomerat itu dikejar-kejar, ia dan anggota keluarga lainnya berkali-kali pindah rumah di Jakarta. Ribka baru merasakan keluarganya tenang setelah mendapat dukungan dari PDI pro-Megawati tahun 1990-an. Semasa pendidikan, ia memang ulet dan tabah, sekalipun kesulitan selalu melanda dirinya, terutama karena ayahnya eks Tapol PKI. Kini, Ribka menjadi aktifis yang kritis dan pemberani, bahkan terhadap Taufik Kiemas dan Megawati yang sudah menjadi orang nomor wahid di Indonesia itu. Bersama Sulami dan kawan-kawan, ia mendirikan YKPK 1965/1966. Selengkapnya, baca Ribka Tjiptaning Proletariyati, *Aku Bangga Jadi Anak PKI* (Jakarta: Cipta Lestari, 2002) cet. Ke-2.

³⁵Aruji adalah pendiri Lasjkar Wanita Indonesia atau Lasjwi di Bandung tahun 1945. Satuan ini mengangkat senjata dan berangkat ke garis depan medan pertempuran, bergiat dalam melakukan perawatan prajurit yang menderita luka, menyelenggarakan dapur umum dan menjahit seragam prajurit. Satuan-satuan semacam ini menyebar ke seluruh Jawa, serta Sumatera Tengah dan Selatan, Sulawesi Tengah dan Selatan. Gadis Arivia, “Soekarno dan Gerakan Perempuan: Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan”, *HU Kompas*, Jumat, 1 Juni 2001.

menikah dua kali. Suami keduanya, seorang haji yang komunis. "Jika kamu ingin bekerja untuk rakyat, maka harus masuk PKI", pesan suaminya. Ia memenuhi kata suaminya. Lalu, ia menjadi salah seorang perempuan PKI yang membantu berdirinya Gerwis. Ia juga anggota Aisyiah dan merasa tak ada salahnya merangkap demikian. Bung Hatta pernah mengatakan, dalam masyarakat demokratis setiap orang boleh masuk organisasi yang disukainya. Ny. Aminah tetap berpendapat, tidak ada pertentangan antara Islam dan Gerwani. "Barangsiapa menghormati perempuan, dia akan semakin terhormat. Dan barangsiapa yang menghina perempuan, dia akan semakin terhina", katanya mengutip sabda Nabi. Pernah suatu ketika ia ditugasi Gerwis di Jawa Barat yang mempunyai anggota 100 orang lebih yang terdiri dari pemilik teh yang juga anggota Sarbupuri. Seorang ustadz berkata padanya, Gerwani itu menentang Islam dan hendak menhancurkan agama. Tak kurang dari 7 orang keluar dari organisasi, setelah Ny. Aminah menjelaskan pendirian Gerwani yang sebenarnya, semuanya kemudian kembali ke organisasi.³⁶

Sejak semula, perbedaan pandangan antara kaum agamawan dan Gerwani dikarenakan kecenderungannya pada ide komunisme yang sebenarnya tak luput dari "role" politik zamannya. Gerwani

sering bersitegang dengan organisasi perempuan agamis. Demikian pula sebaliknya, meski hal itu sebenarnya semakin menggoyahkan persatuan pergerakan perempuan³⁷ karena mereka tidak lagi melihat substansi gerakannya. Menarik apa yang dikemukakan oleh orang yang terkena langsung dari akibat tragedi ini:

Apakah kami telah berbuat kesalahan? Kami hanya bicara dan bekerja keras untuk kebaikan. Kemudian menerima hukuman seberat itu. Sekarang habis segala-galanya sudah. Tidak hanya gerakan itu menjadi berantakan, tetapi rakyat juga dibunuh. Perlawanan kebudayaan dan perjuangan untuk hak-hak sama dalam perkawinan ternyata terlalu berat. Kami berusaha meyakinkan semua gadis-gadis remaja ini, bahwa kami berjuang untuk rakyat, untuk keadilan. Mereka mempercayai kami. Mereka bekerja membanting tulang. Lihatlah mereka sekarang. Apa jadinya mereka itu? Tentunya kami sudah berbuat banyak kesalahan. Barangkali perlawanan kami terhadap permaduan dulu terlalu keras. Jika salah seorang anggota kami menerima menjadi isteri kedua seseorang, ia kami keluarkan dari Gerwani. Mungkin, kami berjalan terlalu cepat.

Sebagaimana PKI melawan orang-orang muslim anti-nasionalis yang bukan karena alasan agama, maka sebenarnya untuk melaksanakan rekonsiliasi ini juga sama, yakni melalui kesadaran kemanusiaan, bukan karena mereka komunis. Peristiwa NU memisahkan diri dari

³⁶Wierenga, *op. cit.*, hlm. 431-433.

³⁷Tita Marlita, *op. cit.*, hlm 104.

Masyumi, semakin memperkuat alasan PKI untuk membuktikan pendiriannya yang tidak anti-muslim. Begitu pula dengan rekonsiliasi melalui gerakan perempuan, dengan mengangkat pilihan isu sebagai gerakan bersama hendaknya lebih didasari oleh kemanusiaannya.

Sudah bukan saatnya lagi gerakan perempuan Indonesia tersekat oleh “baju ideologinya” masing-masing. Mereka harus dipersatukan di atas landasan moral dan nilai kemanusiaan. Bila menolak poligami, maka alasannya bukan semata karena landasan teks dan penafsirannya, tapi juga dari sisi kemanusiaannya baik sosilogis maupun psikologis. Demikian juga dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Buku *Perempuan Menuntut Keadilan* (1998), dapat menjadi inspirasi juga berkaitan dengan rekonsiliasi Islam dan komunis. Isu demikian dapat menjadi perekat bersama. Berbagai pernyataan sikap dan tuntutan dapat dilakukan dari lembaga-lembaga perempuan, baik dari kelompok Orde Baru (Dharma Wanita, Kowani, dst), Pemerintah sendiri (Presiden dan Menteri Peranan Wanita), ataupun LSM dan institusi pejuang HAM (organisasi nirlaba; Mitra Perempuan, Komnas HAM, dst). Beberapa tuntutan itu, antara lain;

Pertama, meminta maaf kepada masyarakat, khususnya kepada korban kekerasan atas kegagalannya melindungi dan memberikan rasa aman. *Kedua*, memberi jaminan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. *Ketiga*, menjamin rasa aman kepada korban, keluarga korban, tim



relawan beserta pihak profesional yang menangani dan mendampingi korban kekerasan.³⁸

Menilik dari kasus-kasus perjuangan kaum perempuan Indonesia seperti tersebut di atas, nampaknya rekonsiliasi antara perempuan “komunis” dan Islam (baca: NU, khususnya, umat Islam pada umumnya) tidaklah “sulit”, karena akar persoalan sebenarnya adalah dimensi kesadaran. Pada tahapan kesadaran individual, kultural dan non-formal, barangkali sudah tidak ada masalah.

Begitupun dengan kesamaan basis massa. Mayoritas umat Islam (maksudnya, warga NU) terdiri atas para buruh pabrik, petani, nelayan, dan sebagainya. Lalu, taraan, dan penghormatan pada kera-

memiliki isu yang sama dari zaman Kartini hingga saat ini, seperti masalah perkawinan (poligami), perdagangan anak, kesehatan reproduksi, pendidikan perempuan, dan seterusnya.

Dalam konteks demikian, agama atau paham (isme-isme) sebagai basis ideologi pergerakan perempuan, sebenarnya bukanlah satu-satunya alasan para perempuan untuk bertemu. Ada hal lain yang lebih substantif dan fungsional lagi, yakni kepentingan perempuan. Kesadaran semacam ini, jika ada kehendak politik (*political will*) dari semua pihak dan mau duduk bersama, maka rekonsiliasi tidaklah sulit. Barangkali, rekonsiliasi akan lebih mudah bila hanya diasumsikan sebagai pra-syarat pertemuan semata. Di sinilah letak persoalannya kesadaran tersebut.

Hal lain yang juga penting adalah perlu disosialisasikannya "pelurusan" sejarah Gerwani dalam literatur pendidikan sekolah formal. Artinya, di sini kurikulum perlu dirombak dan diganti dengan kurikulum baru, terutama pada bagian-bagian yang memuat cerita "bohong" tentang Gerwani sejak peristiwa G 30 S meletus.

Bagaimana dengan masyarakat sendiri jika hal ini disampaikan? Saya menduga ada tiga kelompok yang bereaksi, yaitu kelompok penolak, pendukung, dan diam atau tidak bersikap. Arinya, akan terjadi

"perang" wacana atau kontroversi lagi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana masyarakat bereaksi negatif terhadap usulan Abdurrahman Wahid saat menjadi Presiden RI agar TAP MPRS XXV/1966 dicabut. Dengan tanpa menafikan kemungkinan itu terulang lagi, sebagai "pembela" perempuan, di sini penting untuk merenungkan apa yang dikeluhkan oleh salah seorang Gerwani;

...adakah di dalam wacananya yang "feminis" sesuatu yang dapat menjelaskan, mengapa sesudah "kejadian" Oktober 1965 Gerwani dituduh sebagai menggalakkan pelacuran, kemesuman, tari gila-gilaan dan sebagainya.³⁹

Barangkali, ada konteks yang lebih jauh lagi dalam masalah tersebut, yakni ketika kepentingan para nasionalis tercapai perempuan dikembalikan ke tempatnya semula dan "dilarang" untuk merambah daerah yang memang mewajibkan pembedaan perlakuan laki-laki dan perempuan. Kenyataan bahwa pergerakan perempuan dimanfaatkan oleh pergerakan nasional bukanlah ciri khas pergerakan perempuan di Indonesia, karena hal yang sama terjadi pada pergerakan perempuan di banyak bekas negara jajahan.⁴⁰

Islam sebagai agama yang mengajarkan kedamaian, keselamatan, kese-

³⁸Rita Serena Kolibonso (edit.), *Perempuan Menuuntut Keadilan* (Jakarta: Mitra Perempuan, 1998), hlm. 60-87.

³⁹Wierenga, *op.cit.* hlm. 404.

⁴⁰Tita, *op. cit.*, hlm. 110.

gaman, semestinya tidak menjadi soal bila rekonsiliasi dilaksanakan. Begitupun bila melihat hakekat perjuangan perempuan itu sendiri. Sejarah telah mencatat dan memberi penilaian yang tidak pas dan kurang tepat terhadap berbagai masalah.

Bukankah peran negara, pemerintah, atau lebih jauhnya situasi politik saat itu telah menjadikan *mainstream* dan hanya wacana tunggal? Bukankah pula, pemerintah, negara, masyarakat yang ada hari ini juga tergantung bagaimana kita? Jika kita bersedia untuk bertemu, kenapa tidak?!

Memang, sudah seringkali di negara ini dan di belahan dunia lainnya, perempuan "dipakai" untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Gerwani adalah satu di antaranya. Apakah ikhtiar rekonsiliasi Islam dan komunis juga untuk kepentingan politik? Tentu TIDAK! Karena itu, kesadaran dan komitmen bersama adalah

kuncinya.

Bagi gerakan perempuan (feminisme) amatlah jelas, hak-hak perempuan sebagai manusia harus diperjuangkan terlebih dahulu agar ia setara dengan jenis manusia lainnya. Bila ini telah tercapai, terwujudlah masyarakat yang adil dan makmur, negara yang merdeka dan demokratis.⁴¹ Pada konteks

inilah, semestinya ikhtiar rekonsiliasi yang dimaksud

dalam ulasan saya ini diletakkan. Tentu saja, pencabutan TAP MPRS yang diskriminatif itu juga penting, sekalipun Sidang Tahunan MPR RI 2003 kemarin gagal memutuskan hal terpenting bagi kemanusiaan itu. Apakah dengan demikian berarti, kita

(baca: elite politik) belum siap untuk rekonsiliasi komunis dan umat beragama sebagai sesama anak manusia? Dan sudah menjadi *common secret* bahwa, politik masih menjadi panglima di negeri ini. ❖



⁴¹Gadis., *op. cit.*